

PERKOTAAN

Perlu Kolaborasi agar Pembangunan Berkelanjutan

Oleh NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR 29 November 2018



KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Kondisi lokasi pembuangan sisa pembakaran sampah di tempat pembuangan sampah Green Hill Madoka di Fukuoka, Jepang, Selasa (27/11/2018). Lahan tersebut menampung sisa pembakaran sampah sampai 25 tahun ke depan.

TERPOPULER >

1. Melepas Belunggu Plastik, Mulai dari Sedotan
2. Polusi Plastik Semakin Mengancam
3. Langkah Produsen Dinanti
4. "Imagine"
5. Harapan yang Kandas pada Suu Kyi

KORAN ELEKTRONIK KOMPAS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 November 2018 di halaman 14 dengan judul "Perlu Kolaborasi Agar Berkelanjutan".



Baca epaper.kompas.id

TERBARU >

- Siapa Untung, Siapa Buntung
5 Desember 2018
- Hilirisasi Setengah Hati
5 Desember 2018
- Utang Berbunga 10 BUMN Capai Rp 1.731 Triliun
5 Desember 2018
- Pembebasan Lahan Waduk Brigif Ditarget Selesai Akhir 2018
5 Desember 2018
- Jumlah Emiten Ditambah
5 Desember 2018

Thursday November 29th 2018

Collaboration Needed to be Sustainable
FUKUOKA, KOMPAS - Cooperation is absolutely necessary to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Not only between governments or institutions, collaboration needs to be established with the private sector. However, the needs of each country vary. This is the conclusion of the presentation and discussion of the second day of the 9th UN Habitat Environmental Technology Expert Group Meeting on Wednesday (11/28/2018), in Fukuoka, Japan. The forum was attended by representatives from the private sector, local government, and UN Habitat officials. According to Habitat Program Manager for Nepal Padma Joshi, the approach to implementing SDGs must be different compared to the global agreement on the Millennium Development Goals (MDGs). The difference is that the private sector must be more involved.

In his presentation, CEO of SDGs Partners Inc. Kazuo Tase said, basically the private sector remained profit oriented. However, it does not mean that the efforts made by the private sector cannot accommodate SDGs. For example, many financial institutions are interested in funding programs that have wider social impact, not just programs. Thus the benefits of a business are felt by more people.

"The Sustainable Development Goals have 17 aspects that are related to each other. Actually, collaborating a policy from the government can affect other aspects," said Tase.

Taze gave an example, in Okinawa, Japan, the local government wanted to protect and expand the coral reefs in the sea. Then, the central government together with the private sector supported by focusing on developing tourism in the form of resorts. Residents who were originally fishermen could then depend on the tourism sector.

However, the need to apply every aspect of the SDGs varies from country to region. According to the Country Program Manager for Myanmar Bijay Karmacharya, although there are countries that have implemented it, on the other hand there are still many countries that have to struggle to fulfill their basic needs. In countries where there are still conflicts, for example, it is certainly difficult to fulfill that commitment. The application of the SDGs is adjusted to the conditions of each country. Regional Office Director for Asia and the Pacific (ROAP) -UN Habitat Atsushi Koresawa exemplifies Japan. Even though it is economically strong, Japan faces an aging population. Therefore, many policies are adjusted to deal with these trends.

FUKUOKA, KOMPAS — Kerja sama mutlak diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG. Tidak hanya antarpemerintah atau lembaga, kolaborasi perlu dijalin dengan swasta. Namun, kebutuhan bagi setiap negara berbeda-beda.

Demikian kesimpulan paparan dan diskusi hari kedua UN Habitat The 9th Environmental Technology Expert Group Meeting, Rabu (28/11/2018), di Fukuoka, Jepang. Forum ini diikuti perwakilan swasta, pemerintah lokal, dan pejabat UN Habitat.

Menurut Habitat Programme Manager untuk Nepal Padma Joshi, pendekatan untuk menerapkan SDG mesti berbeda dibandingkan dengan kesepakatan global Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Perbedaannya, swasta mesti lebih banyak dilibatkan.

Dalam paparannya, CEO SDG Partners Inc Kazuo Tase mengatakan, pada dasarnya swasta tetap berorientasi pada profit. Namun, bukan berarti usaha yang dilakukan swasta tidak bisa mengakomodasi SDG. Contohnya, lembaga keuangan sudah banyak yang tertarik mendanai program yang berdampak sosial lebih luas, bukan sekadar program. Dengan demikian, manfaat sebuah usaha dirasakan lebih banyak orang.

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 aspek yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebenarnya, kolaborasi sebuah kebijakan dari pemerintah bisa berpengaruh pada aspek lain," kata Tase.

Taze mencontohkan, di Okinawa, Jepang, pemerintah lokal hendak menjaga dan memperluas terumbu karang yang ada di laut. Kemudian, pemerintah pusat bersama pihak swasta mendukung dengan fokus mengembangkan pariwisata berupa resor. Penduduk yang awalnya nelayan kemudian bisa bergantung hidup dari sektor pariwisata.

Namun, kebutuhan untuk menerapkan setiap aspek dari SDG berbeda-beda untuk setiap negara, bahkan daerah. Menurut Country Programme Manager untuk Myanmar Bijay Karmacharya, meski ada negara yang sudah menerapkannya, di sisi lain masih banyak negara yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara yang masih ada konflik, misalnya, tentu sulit memenuhi komitmen itu.

Penerapan SDG agar disesuaikan dengan kondisi setiap negara. Director Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP)-UN Habitat Atsushi Koresawa mencontohkan Jepang. Meskipun secara ekonomi kuat, Jepang menghadapi penduduk yang menua. Karena itu, banyak kebijakan disesuaikan dalam menghadapi tren tersebut.

Senior Manager Atgreen Co Ltd Seiya Tominaga, salah satu perwakilan swasta, berharap agar pemerintah lokal senantiasa mengkomunikasikan mengenai rencana atau program ke depan. Meskipun pengaruh swasta, termasuk usaha kecil menengah (UKM) terbatas, mereka bisa menjangkau masyarakat.